

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap anggaran kas pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran kas, berarti *hipotesis ini terdukung* dengan nilai koefesiennya sebesar $0,024 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dokumen perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur akan meningkatkandaya serap anggaran kas.
2. Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran kas, berarti *hipotesis ini tidak terdukung* dengan nilai koefesiennya sebesar $0,435 > 0,05$. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi yang ada pada Dinas sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mempengaruhi daya serap anggaran kas.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran kas, berarti *hipotesis ini terdukung* dengan nilai koefesiennya sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan semakin memadainya kompetensi SDM yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur maka akan semakin meningkatkan daya serap anggaran kas.

4. Dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran kas, berarti *hipotesis ini terdukung* dengan nilai koefesienya sebesar $0,025 < 0,05$. Hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan dokumen pengadaan dan pejabat/pegawai yang menanganinya pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur maka akan meningkatkan daya serap anggaran kas.
5. Uang Persediaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran kas, berarti *hipotesis ini tidak terdukung* dengan nilai koefesienya sebesar $0,903 > 0,05$. Hal ini menunjukkan baik atau buruknya mekanisme penggunaan uang persediaan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sebaiknya dalam proses pembuatan Dokumen perencanaan para pejabat menentukan jumlah anggaran sesuai kebutuhan pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tidak terjadi revisi yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran kas yang disebabkan harus menunggu persetujuan dari pejabat berwenang.
- b. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menambah atau meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia agar dalam pelaksanaan tugas kiranya tidak terjadi rangkap tugas yang menyebabkan keterlambatan tugasnya, dan kiranya para pegawai yang diberikan tugas

dan tanggung jawab tersebut sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut atau sudah mendapat pelatihan terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan persentase daya serap anggaran kas.

- c. Untuk meminimalisasi permasalahan pejabat/pengelola terkait yang mengalami mutasi, maka sebaiknya pola mutasi diatur sedemikian rupa agar pola mutasi bagi pengadaan barang/jasa dalam pengesahan dokumen pengadaan, misalnya mutasi dilakukan setelah tahun anggaran selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Anonim. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Anonim. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Anonim. 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015*
- Anonim. 2016. *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016*
- Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. *Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim.* Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate.* Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Herryanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya serap anggaran kas Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga Di Wilayah Jakarta.* Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
- <http://civiliana.blogspot.com/2013/05/Standar-Dokumen-Pengadaan-Barang-Jasa-Pemerintah-Perpres-No-70-Tahun-2012.html>
- <https://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap-penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah/>
- <https://www.facebook.com/julius.latumaerissa/posts/1279959755377337>
- <http://www.gurupendidikan.co.id/20-pengertian-administrasi-menurut-para-ahli/>

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/PARIS%20REV%20NEW/PR%20Ed%206kcl%20.pdf>

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Madarsiamo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi kedua. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miliasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nawawi. 2001. *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: GM University Press.
- Putry,Carlin Tasya. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penyerapan anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Tesis. Universitas Bengkulu.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD*. Purwokerto;Universitas Jendral Soedirman
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Suparmoko. 1990. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.